PEMAHAMAN TENTANG HUKUM DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Rini Maria*

ABSTRACT

As a matter of fact, generally the legal awareness is an essential factor for every positive law. It means that a positive law or a legal structure has to portray the legal awareness. Consequently, a legal structure or a positive law that does not portray that legal awareness is in fact not a law but merely a manifestation of power or worse which is still an expression of supremacy.

Kata kunci: Hukum. Kesadaran Hukum.

I. PENDAHULUAN

Bicara "apa" tentang hukum, mungkin sangat dirasa terlalu dangkal bagi orang yang merasa dirinya ahli hukum. Bahkan mungkin hal itu dianggap sebagai celotehan bayi yang baru bisa bicara, yang dianggap orang dewasa pembicaraan itu telah dilaluinya dan itu sudah tidak penting lagi baginya. Namun tidak bisa disangkal, hingga sampai saat ini, tidak ada satupun pemahaman tentang hukum yang dapat dipahami oleh semua orang. Meskipun sekiang banyak ahli hukum mendefinisikan hukum, ternyata tidak ada satupun formulasi yang sempurna. Bahkan makin banyak belajar hukum, makin sulit pula mengartikan apa yang dimaksud dengan hukum.

Pada sisi lain, orang menganggap bahwa bicara hukum adalah bicara soal aturan sehari-hari. Ketika orang merasa berada dalam aturan hukum, maka ia menganggap dirinya paham tentang hukum. Sebaliknya, ketika orang berada di luar aturan hukum, ia menganggap bahwa dirinya tidak tahu atau kurang sadar hukum. Karena itu persoalan pemahaman dan kesadaran hukum dianggap bukan suatu masalah yang perlu dibicarakan atau dikaji. Padahal pada kenyataannya, orang yang menganggap dirinya sadar hukum, kerap melanggar hukum itu sendiri.

Geris-geris Besar Haluan Negara 1978 misalnya, pernah menuliskan bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Khatolik Atmajaya Jakarta.

hukum dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum". Sebenarnya penegakan ini merupakan manifestasi dari prinsip Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945 (disingkat UUD 195). Pengaturan ini menunjukkan bahwa persoalan hukum, termasuk pemahaman dan kesadaran hukum terus menjadi wacana, yang setiap saat perlu dikaji. Apabila dalam kondisi negara Indonesia sedang mengalami pancaroba akibat krisis multidimensi, yang menyebabkan pengertian, pemahaman, dan kesadaran hukum kembali menjadi terabaikan atau mungkin ada degradasi makna hukum. Karena itu, persoalan ini tidak kalah pentingnya untuk dikaji kembali.

Dari kondisi di atas, penulis menanggapi perlu adanya pengkajian kembali terhadap hukum dan kesadaran hukum. Sasarannya adalah sangat sederhana, agar semua komponen bangsa kembali mendapat penyegaran kembali makna dan hakikat hukum serta kesadaran hukum, sehingga paling tidak keterabaian hukum dapat diminimalkan. Itulah yang ingin penulis sajikan dalam tulisan yang sederhana ini.

II. PERMASALAHAN

Berangkat dari kesederhanaan pemikiran di atas, penulis mengangkat permasalahan yang juga tampak sederhana, meskipun hakikatnya persoalan itu menjadi inti dari pemahaman hukum itu sendiri. Permasalahan dimaksud adalah, apa yang dimaksud dengan hukum dan kesadaran hukum? Melalui pengkajian normatif, penulis mencoba mendeskripsikan kedua hal tersebut. Paling tidak, melalui deskripsi ini, penulis ingin menyajikan kembali gambaran tentang makna hukum dan kesadaran hukum.

III. PEMAHAMAN TENTANG HUKUM

Apabila setiap warga negara harus taat kepada hukum dan negara menjamin penegakkan dan kepastian hukum, maka dengan sendirinya semua pihak perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum. Hal ini menjadi penting, ketika negara yang berkedaulatan rakyat menetapkan hukum secara konsensus sebagai patokan bagi legalitas segala tindakan bernegara, berbangsa maupun bermasyarakat.

Tentang apa yang dimaksud dengan hukum, sebuah buku yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum" yang aslinya bernama "*Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandsche Recht*" (van Apeldoorn, 1960 : 13-26) telah membicarakannya secara panjang lebar. Bahkan pendapat Emanuel Kant,

yang kurang lebih telah disampaikannya 150 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*", yang sampai sekarang menjadi benar karena para pakar ilmu hukum masih mencari definisi tentang pengertian hukum. (Kansil, 1980 : 3)

Ucapan Emanuel Kant tampak benar, karena hampir semua sarjana hukum dan pakar-pakar ilmu hukum telah memberikan definisi hukum sesuai dengan sudut pandangnya sendiri. Akibatnya sangat disayangkan, bahwa definisi-definisi tersebut ternyata berbeda satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan permasalahan baru, "definisi mana yang benar atau dapat dijadikan pegangan?"

Hal serupa juga tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Meskipun para ahli hukum Indonesia telah mencoba membuat rumusan tentang pengertian hukum ternyata tidak satupun yang memuaskan. Bahkan pada tahun-tahun yang akan datang, dapat diperkirakan masih belum ada konsensus yang memuaskan tentang apa sebenarnya hukum itu. Ini disebabkan, hampir semua ahli hukum yang telah mencoba untuk memberikan definisinya, ternyata tidak dapat menyatukan pengertian hukum yang beryak seginya dan demikian luasnya.

Hal di atas, setidaknya-tidaknya telah membuktikan kepada kita bahwa hukum yang sangat banyak seginya yang berbeda satu dengan lainnya, sulit diartikan secara tepat. Akibatnya rumusan pengertian hukum selalu menjadi problema. Kenyataan ini seperti yang diakui oleh seorang bekas guru besar Universitas Indonesia, W.L.G. Lemaire dalam bukunya "*Het Recht in Indonesia*" antara lain "...*De veelzijdigheid en veel omvattendheid van recht brengen niet alleen met zicht, dat het onmogelijk is in een enkele definitie aan te geven wat recht is*", yang berarti banyaknya segi dan luasnya isi hukum, tidak memungkinkan ada rumusan hukum yang sebenarnya (Kansil, 1980: 34).

Walaupun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang hukum, namun seorang pakar ilmu hukum, yaitu E. Utrecht, telah memberikan batasan hukum bahwa: "Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu". (Kansil, 1980: 36). Meskipun beliau mampu merumuskan pengertian hukum, namun beliau juga mengingatkan bahwa batasan itu merupakan pegangan semata, yang maksudnya menjadi suatu pedoman bagi setiap wisatawan hukum yang sedang bertamasya di alam hukum.

Selain Utrecht, Amin mengatakan bahwa "Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi". Selanjutnya beliau menyatakan bahwa tujuann hukum adalah untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara (Kansil, 1980 : 36). Jika dibandingkan dengan pendapat sebelumnya, Amin coba melihat hukum bukan hanya dari segi aturan yang harus ditaati, tetapi juga dari segi sanksi yang dapat dikenakan, karena hukum mempunyai tujuan tertentu. Permasalahannya adalah apakah setiap aturan atau hukum mempunyai sanksi? Apakah kalau tidak mempunyai sanksi berarti aturan itu bukan hukum? Tampaknya solusi dengan menempatkan sanksi dalam rumusan hukum belum memberi kepuasan tentang pengertian hukum.

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto merumuskan bahwa "Hukum adalah peraturan-peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu". (Kansil, 1980: 36). Rumusan ini mencoba melihat hukum dari segi pembuatnya, selain dari segi norma, sifat, dan lingkungan berlakunya. Badan resmi yang berwajib tampak menjadi salah satu unsur penting bagi rumusan pengertian hukum. Dengan semikian, apabila peraturan itu bukan dibuat oleh badan resmi, maka itu bukan hukum.

Persoalan lebih lanjut adalah bagaimana dengan peraturan yang dianggap oleh masyarakat yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan kembangnya masyarakat itu sendiri?. Misalnya hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan yang ditaati masyarakat. Bagaimana pula dengan peraturan yang datang dari aspek kepercayaan, misalnya hukum agama, dan sebagainya. Dari beberapa kelemahan ini, maka rumusan ahli hukum tadi belum mencerminkan rumusan yang sempurna.

M.H. Tirtaamidjaja menyatakan "Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam bertingkah-laku atau bertindak dalam pergaulan hidup, dengan ancaman harus mengganti kerugian jika orang itu megakibatkan kerugian pada orang lain, atau membahayakan diri atau harta orang lain, atau menyebabkan orang kehilangan kemerdekaannya. Ganti kerugian itu berbentuk denda dan sebagainya". (Kansil, 1980 : 36). Pendapat inipun tidak berbeda dengan ahli hukum sebelumnya. Karena itu masih mengandung kelemahan.

Dari aspek tujuan, beberapa rumusan hukum di atas menyatakan tujuan hukum adalah untuk ketertiban pergaulan hidup masyarakat. Namun

pendapat lain, yang dikemukakan oleh J. Bentan menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk kegunaan bagi masyarakat sebesar-besarnya. Kedua pendapat tersebut menggambarkan adanya sisi pandang yang berbeda mengenai aspek tujuan hukum. Meskipun mereka berbeda pendapat, namun dilihat esensinya, mereka sepakat bahwa hukum itu aturan, yang tujuannya adalah mengatur kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya. Sebenarnya tujuan hukum yang dikemukakan mereka, secara garis besar, ingin mewujudkan masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal dalam konteks ini adalah masyarakat yang hidup dengan baik, baik mengenai aspek ketertiban dan ketenteraman, maupun aspek-aspek lainnya. Untuk itu, maka cara yang ditempuh oleh hukum untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan jalan mengatur perilaku manusia.

Mengingat sulitnya membuat rumusan hukum yang sempurna, maka dalam merumuskan hukum perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, setiap kaidah hukum memuat ketentuan/norma tentang cara berperilaku. Cara berperilaku ini diwujudkan dalam rumusan norma yang bersifat perintah dan/atau larangan, dengan sasaran agar tujuan hukum tercapai. Kedua, setiap hukum dibentuk oleh lembaga resmi sesuai dengan lingkungan kewenangan hukumnya. Ketiga, setiap hukum harus sesuai dengan kesadaran atau jiwa hukum masyarakat yang diaturnya.

Kaidah hukum yang memerintah atau melarang suatu perilaku, pada hakikatnya berisi kewajiban-kewajiban atau keharusan-keharusan. Kewajiban yang bersifat perintah mengandung arti sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan yang bersifat larangan mengandung arti sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Hal ini merupakan norma, karena itu hukum bersifat normatif.

Meletakkan kewajiban kepada seseorang selalu mengandung arti memberikan hak kepada orang lain. Karena setiap kaidah hukum juga selalu memberikan hak kepada setiap orang dengan meletakkan kewajiban kepada orang yang lain. Dalam hal demikian, maka hukum juga disebut bersifat atributif.

Kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh hukum, pada dasarnya mengandung tujuan bahwa hukum ingin mewujudkan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran setiap kaidah hukum adalah perilaku manusia. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa sikap batin (niat) manusia sama sekali tidak diperhitungkan, sebab pada dasarnya perilaku manusia mencerminkan sikap batin yang merupakan aspek subjektif dari perbuatan manusia dan perilaku itu sendiri sebagai aspek

obyektifnya. Jadi, perilaku dan sikap batin adalah segi-segi (aspek-aspek) yang sama-sama menjadi sasaran hukum. Perilaku dan sikap batin diibaratkan sebagai "*the sides of the same coin*" (sisi-sisi dari sekeping mata uang logam yang sama). Walaupun kedua hal itu (perilaku dan sikap batin) dapat dibedakan dan bahkan harus dibedakan satu dengan yang lain, namun keduanya tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan. Dengan perkataan lain, perilaku itu manifestasi dari sikap batin. Karena itu, hukum harus memberi tempat yang wajar pada sikap batin. Artinya, hukum juga harus memperhitungkan sikap batin dalam menilai perbuatan manusia.

Berbeda dengan kesesilaan, pada hukum yang pertama-tama dinilai... adalah perilakunya, sedangkan sikap batin akan turut dinilai hanya demi kepentingan kelengkapan bagi penentuan nilai perbuatan seseorang secara menyeluruh (lengkap). Maksudnya adalah sikap batin seseorang dalam kenyataan yang sungguh-sungguh baru akan ikut dipertimbangkan jika sudah terjadi tindakan atau perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum. Jika terjadi suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum, maka barulah akan diselidiki apakah tindakan itu merupakan manifestasi (perwujudan) dari sikap batin (niat) si pelaku.

Jadi, sikap batin bagi hukum baru akan mempunyai arti yang relevan jika sudah menjadi tindakan yang melawan hukum. Sebaliknya selama sikap batin (niat) belum diwujudkan dalam bentuk perilaku, maka selama itu pula belum timbul persoalan bagi hukum. Karena itu, niat jahat untuk melakukan kejahatan yang belum diwujudkan dalam bentuk tindakan pelaksanaan belum dapat dihukum.

Setelah mempelajari batasan-batasan pengertian, tujuan, dan aspek lain dari hukum, yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum terkemuka, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum – pada umumnya – adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum bukanlah merupakan suatu tujuan tetapi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis, yang berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu bersifat dinamis. Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu dapat berbentuk ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat atau antara individu dan individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak.

Hukum mengatur hubungan-hubungan hukum dengan cara beraneka

ragam. Kadang-kadang hukum mengatur hubungan hukum dengan cara merumuskan kewajiban-kewajiban saja seperti pada hukum pidana. Sebaliknya hukum juga sering merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat bagi timbulnya hubungan-hubungan hukum, seperti pada hukum perdata atau hukum administrasi negara. Hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum dapat merupakan wujud keseimbangan kepentingan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, atau hubungan yang berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu, atau hubungan yang melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.

Meskipun hukum mengatur hubungan hukum agar tercipta ketertiban, namun konflik hukum masih dapat terjadi akibat dari konflik antara kepentingan perorangan atau golongan atau masyarakat. Konflik hukum dapat mengganggu tujuan hukum, bahkan hukum sendiri menjadi tidak efektif. Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah, hukum mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, yang menentukan apa yang seyogianya dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh subyek hukum. Kaena itu hukum akan menyelesaikan konflik hukum sehingga hukum dapat mengiringi masyarakat makin berkembang.

Secara garis besar, fungsi hukum dapat digolongkan dalam empat kategori, yaitu:

1. Hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum memberi pedoman yang baik tentang bagaimana masyarakat berperilaku. Hukum memberi petunjuk tentang mana yang baik dan mana yang tercela. Dengan hukum, anggota masyarakat mendapat kejelasan tentang apa yang harus diperbuat atau tidak boleh diperbuat, sehingga pada akhirnya tercipta suatu kondisi masyarakat yang tertib dan teratur.
2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial serta rasa aman lahir dan batin. Hukum yang sifat dan wataknya memaksa, memiliki daya ikat yang kuat baik terhadap fisik maupun psikologis. Melalui sifat ini, hukum akan memaksa berbagai konflik atau pelanggaran hukum untuk diselesaikan secara hukum, sehingga hukum akan memberi keadilan dengan cara menghukum yang bersalah dan menciptakan rasa aman kepada masyarakat yang benar.
3. Hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Hukum yang memiliki daya ikat dan daya paksa dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pembangunan. Dalam hal ini, hukum menjadi alat otoritas untuk

membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Meskipun demikian, fungsi ini sering mendapat kritik, karena hukum bersifat memaksa, melakukan pengawasan terhadap perilaku manusia, dan hanya mengikat masyarakat, sedangkan aparatur otoritas yang beralih menggerakkan pembangunan lepas dari pengawasan hukum.

4. Hukum sebagai fungsi kritik, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawas atau aparatur pemerintah pada umumnya, melainkan juga memberi kritikan atas perilaku yang dianggap menyimpang atau bertentangan dengan hukum.

Agar hukum melaksanakan fungsinya dengan baik, maka penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan baik. Bagi hukum yang memiliki kaedah yang sangat *applicable* penerapannya tidak mengalami banyak kesulitan dalam melaksanakan fungsinya, karena kaedah itu dengan pasti dapat dilaksanakan. Sebaliknya hukum yang kurang atau tidak memiliki kaedah yang *applicable* akan sulit penerapannya, karena masih menimbulkan perbedaan penerapan. Terhadap hukum yang disebut terakhir ini, penerapannya membutuhkan interpretasi sesuai dengan keadaan dan posisinya. Di sinilah sebenarnya peran penegak hukum itu dibutuhkan untuk menerapkan hukum sesuai dengan keadilan sosial dan kebenaran.

Pandangan-pandangan yang secara ekstrim dan tegas membedakan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan dari peradilan ternyata, pada dewasa ini, tidak dapat dipertahankan. Karena ajaran yang berlaku dewasa ini menyatakan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara, misalnya melalui pembentukan oleh pejabat pembuat hukum, putusan pengadilan, kebiasaan atau pergaulan sosial.

Pembentuk undang-undang membuat peraturan-peraturan umum dan hakim harus menerapkan undang-undang ke dalam bentuk putusan pengadilan. Penerapan undang-undang oleh hakim tidak dapat berlangsung secara mekanis, tetapi memerlukan penafsiran sesuai dengan karakter kasusnya. Hal ini mengingat peraturan perundang-undangan kerap kali tidak sempurna atau istilah-istilah digunakannya masih kabur, sehingga maknanya harus ditafsirkan lebih jauh oleh hakim.

Selain itu, dalam hal menghadapi perkara, hakim kadang-kadang mengalami kekosongan hukum, sehingga hakim harus mengisinya melalui putusan peradilan. Dengan demikian, meskipun pembentuk UU dan pengadilan dapat membantuk hukum namun dalam banyak hal keduanya

saling terkait dalam membentuk hukum, bahkan keterkaitan inipun terjadi dengan kebiasaan masyarakat.

IV. UNDANG-UNDANG

Di Indonesia, undang-undang (UU) merupakan salah satu jenis hukum, sehingga di dalam UU juga ditetemukan adanya hukum. Meskipun demikian, kita belum bisa menemukan hakikat hukum yang sesungguhnya, karena di sana hanya sebagian hukum yang dapat diketahui. Karena itu adalah salah besar apabila ada pandangan yang mengatakan hukum itu sama dengan UU.

Secara teoretis, undang-undang dibedakan menjadi dua macam yaitu UU dalam arti material dan UU dalam arti formal. UU dalam arti material adalah setiap peraturan perundang-undangan yang isinya langsung mengikat masyarakat secara umum dan tidak ditujukan kepada seseorang tertentu. Dalam pengertian ini tidak dipersoalkan siapa lembaga formal yang berwenang membuat UU, karena yang dilihat hanya apakah aturan itu berlaku atau mengikat umum atau tidak. Undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang secara formal berwenang membentuk UU melalui tata cara dan prosedur yang ditetapkan. Dalam pengertian ini lembaga pembentuk UU dan prosedur pembentukan UU menjadi kriteria untuk menentukan suatu peraturan disebut UU.

Dalam perkataan lain, perbedaan dari kedua macam undang-undang di atas terletak pada peninjauannya. Undang-undang dalam arti material ditinjau dari isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formal ditinjau dari segi pembuat dan bentuknya UU. Pembuat UU adalah legislatif dan bentuk peraturan yang dibuatnya adalah UU.

Bagi Indonesia, pembedaan UU ke dalam dua jenis di atas hanya mempunyai makna teoretis, karena secara normatif UU di Indonesia tidak bisa dibedakan ke dalam dua jenis tersebut. Pasal 20 Ayat (1) Perubahan I UUD 1945 menyatakan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Kemudian Ayat (2) pasal tersebut juga menyatakan "Rancangan undang-undang dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama". Ini berarti hukum normatif Indonesia hanya mengenal UU yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR, sehingga berbagai peraturan lain yang dibentuk oleh selain kedua lembaga tersebut tidak bisa disebut sebagai undang-undang.

Undang-undang itu sendiri berisi kaedah hukum yang bersifat umum, yang mengikat dan sekaligus melindungi kepentingan setiap orang. Artinya ketika UU itu berlaku, maka orang yang menjadi sasaran UU tersebut harus taat dan tunduk kepadanya, namun UU itupun melindungi orang atas perbuatan yang dilarang menurut UU tersebut. Mengingat demikian, maka kaedah hukum dalam UU harus diketahui oleh setiap orang. Persoalannya bagaimana caranya agar setiap orang mengetahui adanya UU tersebut. Pada kenyataannya hampir di semua negara menggunakan teori anggapan, bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen*). Inilah yang disebut *fictie*, yang merupakan asas yang berlaku dewasa ini, sehingga ketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf. Untuk memenuhi fiksi hukum ini, maka undang-undang harus diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Negara (LN). Di zaman Hindia Belanda, Lembaran Negara dikenal juga dengan nama *Staatsblad* (Stbl.).

Sehubungan dengan asas ini penulis dapat mengemukakan contoh putusan pengadilan yang menolak permohonan kasasi dengan alasan pemohon tidak tahu hukumnya. Putusan pengadilan dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung No. 465 K/Sip/1971 tanggal 10 Februari 1971 yang menolak permohonan kasasi seorang penggugat dengan alasan antara lain bahwa ia tidak memahami aturan-aturan hukum dengan menegaskan bahwa tiap orang dianggap mengetahui aturan-aturan hukum (Mertokusumo, 1999 : 80).

Dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hirarki peraturan perundang-undangan. Ada peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dan ada yang mempunyai tingkatan lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Apabila terjadi konflik antarperaturan, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggilah yang akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sebab peraturan perundang-undangan yang lebih tinggilah yang mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi. Ini merupakan asas yang dikenal dengan adagium *lex superior derogat legi inferiori*.

Peraturan perundang-undangan memperlihatkan suatu karakteristik suatu norma bagi kehidupan sosial yang lebih matang, khususnya dalam hal kejelasan dan kepastiannya. Hal tersebut tidak lepas kaitannya dengan pertumbuhan negara itu sendiri, karena peraturan itu muncul setelah adanya kekuasaan negara di bidang pembuatan peraturan. Peraturan perundang-

undangan mengurus hubungan antara orang dengan negara, sehingga bentuk peraturan ini tidak akan muncul sebelum timbul negara, sebagai pengembalian kekuasaan yang bersifat sentral dan tertinggi.

Sebagai salah satu sumber hukum, peraturan perundang-undangan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan norma-norma sosial yang lain, karena peraturan perundang-undangan dibentuk oleh kekuasaan negara dan karena itu memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Dengan demikian adalah mudah bagi peraturan perundang-undangan untuk menentukan ukuran-ukurannya sendiri tanpa perlu menghiraukan tuntutan-tuntutan dari bawah. Kelebihan lain dari peraturan perundang-undangan adalah ia dapat memberikan kepastian mengenai nilai tertentu yang dilindungi oleh hukum. Inilah yang tidak ditemui dalam norma-norma sosial lainnya.

Mempelajari undang-undang saja akan memberi pemahaman yang keliru, jika ingin mengetahui tentang hukum, mengingat lingkungannya berbeda. Tetapi apakah tidak ada sesuatu yang sama antara undang-undang dengan hukum. Yang sama adalah keduanya berisi aturan tingkah laku, tetapi tingkat laku yang diatur dalam UU belum mencerminkan tingkat laku menurut hukum. Tingkah laku menurut UU adalah tidak lain daripada salah satu tingkah laku hukum.

Apabila hukum disamakan dengan UU dan secara material yang dimaksud undang-undang adalah semua keputusan pemerintah yang ditetapkan dengan bentuk-bentuk tertentu, maka dapat dikatakan bahwa hukum adalah peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga keberadaan hukum karena adanya undang-undang. Paham ini sangat tidak realistis, karena dalam sudut sejarah, pada abad-abad pertama sesudah Nabi Isa, bangsa Germania yang pada waktu itu telah mengenal pergaulan hidup dan waktu, namun pada waktu itu belum terdapat undang-undang. Meskipun demikian, ternyata tidak seorangpun berani mengatakan bahwa pada waktu itu tidak ada hukum. Karena pada waktu itu sudah ada aturan yang dikatakan sebagai hukum bagi mereka.

Undang-undang barulah ada pada waktu pergaulan hidup manusia berada dalam lingkungan bernegara, karena di situ negara dengan kekuasaannya membuat peraturan bagi pergaulan kehidupan kenegaraan. Pada awalnya isi undang-undang baru berupa kehendak penguasa agar dilaksanakan oleh masyarakat. Namun lama kelamaan undang-undang demikian tidak efektif bagi kalangan mayoritas, karena itu mulailah muncul filterisasi isi undang-undang oleh masyarakat, sehingga UU yang isinya

sesuai dengan kehendak rakyat itulah yang ditaati dan dipertahankan. Pada perkembangan berikutnya, seorang Filsuf Jerman terkenal yang bernama Gustav Radbruch mengatakan bahwa suatu undang-undang yang baik dan hendak mencerminkan hukum haruslah mencakup tiga unsur, yaitu: keadilan, kegunaan, dan kepastian (Hukum dan Keadilan, 1978 : 42). Dengan demikian, kita dapat menemukan hukum dalam bentuk undang-undang yang diciptakan oleh negara, yang apabila ingin berlaku efektif, maka UU itu harus memenuhi adil, berguna, dan mengandung kepastian.

V. KESADARAN HUKUM

Istilah kesadaran hukum menunjukkan kategori hidup kejiwaan tentang penerimaan dan ketaatan terhadap hukum. Dalam hukum kebiasaan, hal ini muncul dalam bentuk keyakinan bahwa bertindak sesuai dengan kebiasaan merupakan suatu tuntutan keadilan atau dirasakan sebagai keharusan. Dalam hukum positif, kesadaran hukum adalah merupakan unsur esensial yang tercermin dalam ketaatan sikap, tindak, dan kejiwaan terhadap ketentuan hukum. Fenomena kesadaran hukum bukan hanya tercermin dalam perilaku nyata tetapi juga dalam proses pembentukan undang-undang atau dalam yurisprudensi (keputusan pengadilan). Pada proses pembentukan undang-undang, undang-undang yang dibuat merupakan wujud kesadaran hukum masyarakat. Demikian juga dalam vonis-vonis hakim yang diambil berdasarkan kesadaran hukum yang muncul pada persidangan pengadilan.

Kesadaran hukum merupakan hasil proses penilaian terhadap keharusan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara tertentu yang disyaratkan oleh hukum. Pada proses penilaian ini terjadi identifikasi kehendak pribadi dengan kehendak hukum yang dilanjutkan dengan sinkronisasi antara keduanya. Proses ini berakhir pada penyesuaian kehendak pribadi terhadap sikap dan tindak sesuai hukum. Penyesuaian ini terjadi karena adanya kepercayaan terhadap tujuan hukum yakni menciptakan rasa keadilan dan ketertiban masyarakat (kondisi masyarakat yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya). Jadi orang yang memiliki kesadaran hukum adalah orang memahami kebenaran kaidah hukum yang mengatur perilakunya, melaksanakan kepatuhan pada kaidah hukum, meyakini akan keadilan hukum yang sesuai dengan martabat manusia.

Kesadaran hukum dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu kesadaran hukum pribadi (kesadaran hukum individual) dan kesadaran hukum umum (kesadaran hukum rakyat/masyarakat). Kesadaran hukum pribadi merupakan

kesadaran hukum yang tercermin pada sikap dan perilaku pribadi yang idektik dengan kaedah hukum yang mengikatnya. Kesadaran ini muncul sebagai akibat penilaian pribadi terhadap rasa adil dan tidak adil atas suatu kaedah hukum bagi diri seseorang. Misalnya ketika seseorang mengambil keputusan hukum sesuai dengan kewajiban hukum yang harus dilaksanakannya, maka pada saat itu ia menilai bahwa keputusannya itu adalah sésuai dengan rasa keadilan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat mengandung arti kesadaran hukum kolektif sesuai dengan kehidupan bersama yang dicita-citakan hukum. Di sini kesadaran hukum rakyat pada umumnya yang menjadi ukuran penilaian. Bagi negara yang dalam kehidupan kenegaraannya menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kesadaran rakyat pada umumnya menjadi penting, mengingat hukum di sini merupakan alat untuk membentuk masyarakat ke dalam kondisi tertentu. Hukum akan menarik kemauan masyarakat agar mengikuti kemauan hukum, dan masyarakat akan di bawah oleh hukum ke dalam kondisi yang dicita-citakan hukum. Pada saat rakyat telah berada pada kondisi masyarakat yang dicita-citakan hukum, di situlah kesadaran hukum masyarakat tercipta.

Dalam kehidupan bernegara, kesadaran hukum menampakkan diri dalam tiga bentuk, yaitu :

1. berupa kebiasaan, yakni perilaku nyata yang berulang-ulang dan konstan sesuai dengan kaedah hukum yang hidup di dalam masyarakat (warga negara) dalam menjalani kehidupannya sehari-hari;
2. berupa peraturan perundang-undangan, yakni berupa peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara sebagai bentuk perwujudan kehendak rakyat atau masyarakat.
3. berupa yurisprudensi, sebagai bentuk putusan hukum yang dihasilkan dari kesadaran para pihak yang muncul dalam proses peradilan.

Ketiga bentuk kesadaran hukum di atas merupakan bentuk penomena persesuaian antara perasaan hukum masyarakat dengan kehendak (keinginan) hukum. Kesadaran hukum akan tercipta apabila kaedah hukum tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Sebaliknya hukum yang dibentuk tanpa berdasarkan kesadaran hukum masyarakat akan sukar dilaksanakannya, karena dianggap tidak memberi keadilan dan kebenaran kepada masyarakat.

Seorang warga negara yang baik mengetahui hak dan kewajibannya, bahkan bila perlu dapat menuntut hak-haknya yang diberikan oleh hukum

kepadanya. Hanya dengan demikian, ia dapat menempatkan posisinya pada tatanan kaedah hukum yang diyakini kebenarannya. Perilaku diri dan kaedah hukum yang mengaturnya telah menjadi satu pemahaman, sehingga warga negara dengan baik, dapat bertindak aktif dalam mempertahankan hak dan melaksanakan kewajibannya. Hal ini lebih baik, apabila dibandingkan dengan sikap pasif terhadap kesadaran hukum.

Bagi bangsa yang bernegara atas dasar hukum, sikap pasif terhadap kesadaran hukum merupakan bentuk pengabaian terhadap kaedah hukum yang mengaturnya. Sikap demikian, hanya dimiliki seorang yang berada dalam sebuah negara jajahan, yang tidak turut bertanggung jawab atas kemajuan negerinya. Karena itu, kesadaran hukum warga negara (masyarakat), yang diperjuangkan secara aktif, akan membentuk kualitas negara berdasar atas hukum, mengingat kualitas negara sangat ditentukan oleh dukungan yang diberikan oleh rakyatnya. Dalam pengertian ini, seorang warga negara yang menuntut haknya dan menjalankan kewajibannya menurut undang-undang atau hukum, dianggap sebagai sumbangan bagi terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat dan kesadaran hukum tersebut bukan merupakan paksaan.

Faktor penting lainnya yang menentukan kesadaran hukum warga negara adalah sikap penguasa (pemerintah) yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Apabila penguasa bersikap dan bertindak, misalnya mengeluarkan keputusan yang isinya tidak sesuai dengan perasaan dan keyakinan hukum yang hidup masyarakat, maka akan tercipta ketidaksadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini faktor yang menyebabkan ketidaksadaran hukum masyarakat adalah pemerintah, bukan masyarakat.

Apabila persyaratan-persyaratan dasar tersebut di atas terpenuhi, maka sikap ketaatan warga negara kepada penguasanya merupakan bentuk persesuaian antara kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah. Kesadaran hukum demikian, bukanlah suatu pengertian yang menggambarkan bahwa warga negara harus selalu mengalah terhadap apa yang dibebankan penguasa kepadanya. Kesadaran ini merupakan sikap yang lahir karena bertemunya kewibawaan hukum yang ada pada penguasa dan ketaatan hukum masyarakat, yang bukan karena paksaan atau ancaman melainkan karena dorongan perasaan dan kesadaran susilanya.

Kata "sadar dan taat" kepada hukum, dalam konteks di atas, yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, bukanlah suatu sikap yang pasif, melainkan sikap warga negara yang aktif dan dinamik, karena menyadari hak-hak dan kewajibannya menurut undang-undang. Di sisi lain, Negara

melalui aparaturnya memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum”.

Dalam konteks hukum dan undang-undang, kesadaran hukum tidak hanya berarti sekedar *rule of law* dalam arti *rule of* “undang-undang”, tetapi pada hakikatnya berarti “*rule of justice*”. Dalam bahasa Belanda, hal serupa dikenal dengan sebutan “*Het recht moet zegevieren*”. Demikian juga apabila Van Jhering berbicara tentang “*Der Kampf ums Recht*” (Hukum dan Keadilan, 1978 : 42), maka yang dimaksud kesadaran hukum adalah perjuangan menegakkan keadilan dan bukan hanya sekedar melaksanakan undang-undang.

Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan refleksi dari pandangannya tentang hakikat hukum. Mereka memandang dan memahami hukum bukan karena sekedar sifatnya yang rasional tetapi juga karena pengaruh dari pemahamannya terhadap politik, ekonomi, agama, social-budaya, dan sebagainya. Perubahan dan perkembangan pemahaman mereka politik, ekonomi, agama, social-budaya dan sebagainya mengakibatkan terjadinya perubahan dan perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, adalah wajar apabila tidak ada ukuran pasti tentang isi hukum yang berlaku obyektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa hukum memiliki banyak aspek yang tidak diketahui batasnya dan terus berkembang mengikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, persoalan apa yang dimaksud hukum, sangat sulit untuk didefinisikan secara sempurna. Meskipun demikian, penulis berkesimpulan bahwa hukum adalah aturan yang berisi perintah, kebolehan, dan/atau larangan, yang harus ditaati oleh masyarakat. Hukum bukanlah hanya undang-undang, karena hukum itu lebih luas dari undang-undang. Karena itu orang yang memahami hukum, belum dapat disebut memahami hukum.

Kesadaran hukum merupakan fenomena harmonis antara kewibawaan hukum penguasa dengan ketaatan hukum masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa hukum merupakan bagian dari kebutuhannya untuk dapat hidup tertib, teratur, adil, dan berkeeseimbangan. Sementara itu, penguasa menyadari bahwa hukum merupakan sarana untuk menciptakan ketertiban masyarakat yang harus ditegakkan. Hukum yang diterima oleh masyarakat secara sadar menyebabkan hukum menjadi kekuasaan yang perlu ditaati,

meskipun kekuasaan itu bukan hukum. Hukum di sini mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendak kepada masyarakat dan mengenakan sanksi kepada yang melanggarnya. Inilah arti supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.
- J.L., Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Noor Komala d/h Noordhoff-Kolff N.V. 1960.
- Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Jakarta, PN Balai Pustaka.
- Satjipto, Rahardjo. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1981.
- _____. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti., 1996.
- Soedjono, Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Sudikni, Mertokusumo. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- _____. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Universitas Indonesia. *Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Fakultas Hukum, 1978.